

UPAYA MENJADIKAN PERGURUAN TINGGI SWASTA (PTS) SUATU CENTER OF EXSELENCE ANTARA HARAPAN DAN KENYATAAN

Oleh : H.Subiyanto

Abstract :

This paper aims to determine the level of development, the ideal of progress of private universities in accordance with the demands, desires of the community. The essence of national education policy is the tendency of educational development is directed to the needs, demands of modern society, education Reflections on Private Higher output (graduates) can compensate for lack of absorption stikholder (user's employment), so there is understanding of the quality of graduates of private universities were considered less good.

The development of private higher education between expectations and reality there are several things to note are: a) the unity of teaching, research and community service; b) disciplinary approach; c) Cooperation is not imposed; d) The silence and e) Freedom. New educational paradigms in private universities improve the quality of academic, administrative, student affairs led to a satisfactory outcome (a professional labor-oriented needs of the community).

The role of private universities is very large, because public universities in the conduct of Tri Dharma universities, public expectations of private universities is very high (large enough), because private universities aspire to the intellectual life of the nation. The elements that support the accountability, quality, relevance, institutional autonomy and cooperation network.

Keywords: Private Higher Education, Center of Excellent “.

A. PENDAHULUAN

Pembukaan UUD 45 menyatakan bahwa tujuan pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang dapat survive di dalam menghadapi berbagai kesulitan. Kenyataannya bahwa Indonesia saat sekarang ini sedang dilanda berbagai krisis yaitu krisis ekonomi, hokum, kebudayaan, dan dalam bidang pendidikan. Pendidikan merupakan proses pembudayaan agar bidang pendidikan dapat berkembang. Dewasa ini krisis bidang pendidikan ada dua hal yang menonjol yaitu:

- a. Bahwa pendidikan tidak terlepas dari keseluruhan hidup manusia disegala bidang aspek yaitu politik, hukum, ekonomi dan kebudayaan.
- b. Krisis yang dialami oleh bangsa Indonesia dewasa ini merupakan refleksi dari krisis pendidikan nasional.

Dunia pendidikan ada upaya-upaya mewujudkan pendidikan di Indonesia

menghadapi tantangan, hambatan, dimasa depan dari masyarakat karena bangsa Indonesia memasuki kehidupan global yang kompetitif, serta mengatasi hambatan, tantangan pendidikan.

A. KEBIJAKAN PENDIDIKAN

1. Kebijakan Pendidikan Nasional

Pendidikan di Indonesia ada kecenderungan dalam mengembangkan pendidikan diarahkan kepada proses Indoktrinasi dan menolak segala unsur budaya yang akan datang (dari luar) dengan sendiri pendidikan tidak difungsikan untuk meningkatkan taraf kehidupan rakyat, pendidikan tidak diorientasikan kepada kebutuhan pasar tetapi kebutuhan kehidupan masyarakat. Pendidikan Indoktrinasi mulai masuk dunia pendidikan dari jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Pendidikan dikembangkan sikap, kepribadian, mental,

intelektual sesuai dengan kebutuhan/tuntunan hidup masyarakat. Pendidikan kita diarahkan pada peningkatan kualitas dan target-target kuantitas. Dengan demikian pendidikan mempunyai daya saing global secara nasional maupun dengan negara lain (negara asean). Akuntabilitas pendidikan masih kurang meskipun diterapkan prinsip "Link and match" Akuntabilitas pendidikan masih ditentukan oleh penguasa bukan oleh konsumen, masyarakat, pasar kerja, maka pendidikan dan budaya merupakan hasil karya dari para birokrasi/ penguasa pendidikan, sedang masyarakat (keluarga) kurang berperan dalam mengembangkan bidang pendidikan formal.

2. Refleksi Pendidikan di Indonesia

Pendidikan dan kebudayaan ada hubungan yang sangat erat (keterkaitan) kebudayaan tanpa pendidikan tidak ada praktis pendidikan di Indonesia. Peningkatan mutu pendidikan melalui wajib belajar 9 tahun di lihat dari aspek administrasi dan manajemen pendidikan. Ada beberapa indikator refleksi pendidikan di Indonesia meliputi: 1. rendahnya nilai rata-rata hasil ujian nasional. 2. rendahnya daya serap peserta didik dalam memahami bahan pelajaran yang diberikan. 3. rendahnya tingkat keterkaitan dan kesesuaian antara lulusan yang ada dengan kebutuhan tenaga kerja dalam masyarakat.

Penyebab pokok rendahnya mutu lulusan cukup kompleks dapat di identifikasikan ada beberapa faktor meliputi: 1. faktor dana pendidikan yang relative masih kecil. 2. faktor sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai. 3. faktor kurikulum yang kurang menunjang peningkatan mutu karena masih terlalu sentralistik, tidak realitas terhadap kondisi nyata siswa. 4. faktor "kesemrawutan" system administrasi dan manajemen pendidikan kita, termasuk di dalamnya faktor besarnya campur tangan birokrasi

pemerintah. 5. faktor rendahnya mutu guru.

3. Memperjelas Konsep Pendidikan di Indonesia

Tujuan pendidikan adalah menjadikan peserta didik "manusia yang utuh dan sempurna" atau "manusia pernawan" (Pidarta 2000, 73). "Tercapainya kesempurnaan" ditunjukkan oleh bentuk "pribadi yang bermoral" atau moral chorakteres. Jika dilaksanakan secara konsekuen setiap pendidikan harus diarahkan pada tujuan pembentukan pribadi yang bermoral. Pribadi yang bermoral adalah yang memiliki kemampuan mengelola hidupnya sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (Ahmadi, dkk. 2003:45).

Istilah "Pendidikan Nilai" yang menjadi sasaran adalah nilai-nilai itu sendiri bukan orang atau peserta didik agar mereka bias menghayati nilai-nilai luhur dalam hidupnya, dapat dikatakan istilah pendidikan nilai itu sebetulnya kurang tepat karena telah menjadi kebiasaan. Kebiasaan diartikan sebagai penanaman nilai-nilai atau pengajaran nilai, aspek kogniti memang diperlukan sebagai langkah pertama dalam menghayati nilai-nilai, belum cukup nilai hanya diketahui atau disadari saja. Disamping itu diperlukan kematangan sikap atau kemampuan untuk merealisasinya dalam lingkungan sekolah dan masyarakat.

Istilah "Pendidikan Budi Pekerti" lebih tepat pendidikan nilai karena menjadi sasaran kegiatan pendidikan adalah Budi (kesadaran) dan pekerti (tingkah laku atau perbuatan) peserta didik agar terarah pada nilai-nilai yang luhur. Sejak reformasi dijalankan mulai Mei 1988 sekolah-sekolah negeri mengalami penurunan pendidikan nilai budi pekerti, maka muncul ide Revitalisasi Pendidikan Nilai maka pendidikan nilai di sekolah dapat dijalankan dengan format-format baru dan segar walaupun bersifat formal dan kurikulum.

Sasaran kurikulum nilai adalah agar peserta didik dapat mengalami dan menghayati nilai-nilai kiranya nilai-nilai itu bukan sekedar untuk diajarkan dan diketahui saja, melainkan lebih untuk dialami dan dihayati. Oleh sebab itu pendidikan nilai tidak dapat dipersempit menjadi pengajaran nilai melainkan harus bermuatan pengalaman dan pengamalan yang melibatkan unsure hati dan nurani serta budi pekerti seluruh anggota tubuh.

B. PARADIGMA SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

Pendidikan merupakan jaringan yang dibentuk dan membentuk pribadi-pribadi peserta didik dan masyarakat, analisis mengenai paradigma-paradigma pendidikan nasional dan hasil-hasil yang dicapai secara keseluruhan dapat digambarkan antara kesengajaan, diharapkan dan apa yang telah dihasilkan.

a. Populasi Pendidikan sebagai berikut:

1. Peningkatan pendidikan merupakan pemutusan mata rantai kemiskinan (penanggulangan kemiskinan)
2. Mempercepat terpenuhinya wajib belajar pendidikan sekolah dasar untuk semua anak usia sekolah dasar (education for all)
3. Populasi pendidikan tidak sejalan dengan investasi untuk sector pendidikan dan anggaran belanja pemerintah.
4. Peningkatan kuantitatif pendidikan sejalan dengan peningkatan produktifitas, tingkat ketrampilan tenaga kerja belum seimbang.
5. Popularisasi pendidikan belum sejalan dengan usaha-usaha peningkatan kualitas.

b. Hasil yang dicapai dalam pendidikan

1. Meningkatkan tingkat pendidikan rata-rata penduduk ternyata tidak de-

ngan sendirinya menurunkan tingkat kemiskinan.

2. Peningkatan pertumbuhan ekonomi tidak diikuti peningkatan investasi dalam bidang pendidikan sehingga sulit untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.
3. Angka partisipasi sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi terus meningkat.
4. Pendidikan swasta yang menjadi salah satu pilar pendidikan nasional sejak memasuki kemerdekaan sampai sekarang.
5. Sistem pendidikan yang rendah belum menghasilkan:
 - a) Perencanaan dan manajemen yang efisien
 - b) Memudahkan supervise
 - c) Peningkatan mutu pendidikan
6. Penyelenggaraan pendidikan nasional akan menghasilkan dan akan menjaga mutu pendidikan nasional.

c. Paradigma Pendidikan baru di Indonesia

1. Pratiferasi pendidikan "delivery system" yaitu pendidikan semakin kompleks yang terbuka memerlukan kebijakan yang terintegrasi dalam berbagai program, pelatihan, media cetak, media elektronika.
2. Pendidik nasional ikut serta dalam mendidik manusia Indonesia sebagai insane demokratis yang sadar akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab.
3. Pendidikan dan latihan tenaga professional dalam berbagai tingkat di orientasikan pada kebutuhan daerah dan pasar kerja.
4. Keluarga dan masyarakat ikut bertanggung jawab terhadap terselenggaranya pendidikan nasional.
5. Meningkatkan harkat dan profesi pendidikan serta pemanfaatan tenaga yang professional (H.Hadarinawawi akhir abad 20)

Untuk memperjelas uraian tersebut di atas dapat dipelajari matriks berikut ini

Paradigma Baru Sistem Pendidikan Nasional (H.A.R Tilaar 2000, 173)

Indikator Perkembangan Sisdiknas	ERA ORDE BARU		
	Paradigma (lama)	Hasil yang dicapai	Anomali-Anomali
1. Popularisasi Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Pendidikan merupakan pemutusan mata rantai kemiskinan (teori Lingkaran setan) 2. Mempercepat terpenuhinya pendidikan sekolah dasar untuk semua anak usia sekolah dasar (education for all) 3. Merintis pelaksanaan wajib belajar 9 tahun untuk meningkatkan kecerdasan rakyat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tingkat pendidikan rata-rata penduduk ternyata tidak dengan sendirinya menurunkan angka kemiskinan absolute. 2. Peningkatan tingkat pertumbuhan ekonomi tidak diikuti dengan peningkatan investasi dalam bidang pendidikan sehingga sulit untuk meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan. 3. AP sekolah dasar sekolah menengah dan PT terus meningkat. Tahun 1984 sudah dicapai target 6 tahun pendidikan universal. Namun demikian APPT adalah yang terendah di ASEAN 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kuantitatif tidak sejalan dengan peningkatan tingkat produktivitas. Tingkat keterampilan tenaga kerja kita termasuk terendah di ASIA 2. Tingkat pengangguran sarjana semakin meningkat. 3. Popularisasi pendidikan tidak sejalan dengan investasi untuk sector pendidikan dan anggaran belanja pemerintah. 4. Popularisasi pendidikan tidak sejalan dengan peningkatan kualitas pendidikan.
2. Sistematisasi pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Praktis pendidikan terjadi di sekolah maupun luar sekolah. 2. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat dan negara. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lahirnya UU No. 2 tahun 1989 tentang system pendidikan nasional serta berbagai PP-nya, serta keputusan-keputusan lainnya yang menyelenggarakan system, isi, kurikulum, berbagai jenis dan jalur pendidikan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. pengelolaan, kurikulum, pengadaan dan penyebaran tenaga pengajar SD. 2. Pembukaan berbagai jenis kurikulum dari TK sampai PT. 3. Dengan beralih meningkatkan mutu diadakan system evaluasi terpusat seperti EBTANAS, UMPTN.

	<ol style="list-style-type: none"> Etatisme dalam pendidikan akan menjaga mutu pendidikan nasional 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya satu system nasional, menutup pintu bagi inovasi dan eksperimentasi. Pendidikan swasta yang menjadi salah satu pilar pendidikan nasional sejak perjuangan kemerdekaan telah disubordinasikan pada system yang satu-satunya dipunyai negara. 	<ol style="list-style-type: none"> Lembaga-lembaga yang birokratik didirikan untuk untuk memupuk system kekuasaan yang mematkan inovasi. Lembaga-lembaga pendidikan dari dan oleh masyarakat (swasta) dipersempit.
3. Proliverasi pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Praktis pendidikan terjadi di sekolah maupun di luar sekolah. Pendidikan merupakan tanggung jawab bersama orang tua, masyarakat dan negara. Pertumbuhan ekonomi harus diikuti dengan persiapan-persiapan tenaga-tenaga terampil oleh system pendidikan nasional 	<ol style="list-style-type: none"> Multivikasi jenis dan sumber pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, berbagai pelatihan, radio dan televise, media massa. Semakin lama tanggung jawab masyarakat berkurang dan negara semakin besar, baik dalam biaya maupun dalam manajemen Hasil Sisdiknas semakin menjauhi kebutuhan tenaga trampil, baik tenaga tingkat bawah, menengah, umum, maupun tingkat tinggi 	<ol style="list-style-type: none"> Pendekatan formal tentang pendidikan telah mengakibatkan pengaruh-pengaruh informal dalam pembentukan watak peserta didik semakin signifikan. Pendidikan telah dipesempit menjadi "schooling" Pendidikan dianggap sebagai state bussines yang non profit sedangkan negara sendiri kekurangan biaya. SISDIKNAS berorientasi pada supply, bukan pada demond (kebutuhan) konsumen.
4. Politisasi Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> Pendidikan adalah alat mempertahankan ideology negara. Pendidikan nasional yang baik dengan sendirinya dapat memecahkan maslah-masalah social budaya. 	<ol style="list-style-type: none"> Meskipun cara-cara inoktrisassi melalui P-4 dilaksanakan mulai TK sampai PT, rezim Orde Baru ditumbangkan juga oleh gerakan mahasiswa. Politisasi pendidikan ternyata tidak mematkan kekuatan hati nurani. 	<ol style="list-style-type: none"> Sakralisasi ideology nasional bertentangan dengan pengembangan berfikir kritis yang menjadi tujuan pendidikan. Pendidikan dibebani tujuan suci tetapi tidak di dukung dana yang memadai dan profesi guru yang terpuruk.

	3. Manajemen pendidikan ditangani oleh birokrasi agar tercipta kesatuan persepsi dalam menjalankan tugas pendidikan	3. Politik dapat memanipulasi tujuan etis pendidikan	
--	---	--	--

Indikator Perkembangan Sisdiknas	ERA MASYARAKAT INDONESIA BARU		
	Paradigma (baru)	Usulan Program Pasca-Krisis	Usulan Program 2000-2004
1. Popularisasi Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan dan pelatihan yang bermutu adalah pendidikan yang dibutuhkan oleh rakyat banyak. 2. Pendidikan yang bermutu telah merupakan kebutuhan rakyat banyak. Oleh sebab itu partisipasi keluarga dan masyarakat dalam penyelenggaraan, investasi, evaluasi pendidikan semakin meningkat. 3. Investasi pendidikan sector pemerintah ditingkatkan dan dijadikan komitmen politik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menanggulangi putus sekolah akibat krisis dengan melanjutkan program JPS dengan memperbaiki organisasi pelaksanaannya. 2. Meningkatkan kinerja guru dan tenaga pendidikan sejalan dengan memperhatikan kesejahteraan sosialnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan dan mewujudkan pendidikan berkualitas dengan memberi insentif pada partisipasi masyarakat ASIA. 2. Menyelenggarakan pendidikan guru yang berkualitas. 3. Menyiapkan SDM pendidikan yang professional.
2. Sistematisasi pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan pematapan system pendidikan nasional diprioritaskan kepada lembaga dengan memberi otonomi yang luas. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempersiapkan lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan di daerah: SDM, Organisasi, Fasilitas, program kerja sama antar lembaga di daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Desentralisasi penyelenggaraan pendidikan nasional secara bertahap, dimulai pada tingkat provinsi dengan sekaligus mempersiapkan sarana, SDM, dan dana yang